



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF ROHMAN**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **207701**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.780.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 628 m2/195 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
2. Tanah Seluas 570 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
3. Tanah Seluas 1992 m2 di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 377 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 330.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU LUXIO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR ` Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANSA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



5. LAINNYA, POLYGON SISKIU D7 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	73.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	265.015.518
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.448.765.518
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.448.765.518

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.